



**TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH : PERGESERAN PARADIGMA  
DARI ERA KLASIK KE MODERN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNMENT  
DI ERA DIGITAL**

**Anest Juliana Silitonga**

Universitas Medan Area

Email Korespondensi: [anestoppo@gmail.com](mailto:anestoppo@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to examine the transformation of government bureaucracy from the classical paradigm to the modern paradigm. The classical model, characterized by rigid hierarchy, procedural orientation, and centralization, is gradually shifting toward a modern bureaucracy that emphasizes efficiency, responsiveness, and the use of digital technology. Using a descriptive qualitative approach and literature review method, this research analyzes various scholarly sources, public administration theories, and relevant policy documents. The findings reveal that this transformation is driven by increasing public demands, globalization, and technological innovation. The paradigm shift not only affects the structure and processes of bureaucracy but also necessitates changes in work culture and the mindset of public servants. This study recommends the importance of continuous bureaucratic reform to achieve adaptive, accountable, and service-oriented governance.

**Keywords:** bureaucracy, transformation, classical paradigm, modern paradigm.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi birokrasi pemerintah dari paradigma klasik menuju paradigma modern. Paradigma klasik yang bercirikan hierarki kaku, prosedural, dan sentralistik mulai bergeser ke arah birokrasi modern yang menekankan efisiensi, pelayanan publik yang responsif, serta pemanfaatan teknologi digital. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, teori administrasi publik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini dipengaruhi oleh perkembangan tuntutan masyarakat, globalisasi, serta inovasi teknologi informasi. Pergeseran ini tidak hanya mengubah struktur dan proses birokrasi, tetapi juga menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

**Kata kunci:** transformasi, paradigma klasik, paradigma modern.

**Pendahuluan**

Dalam era dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, menurut Rakhmadani (2022) inovasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memacu transformasi birokrasi. Namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menggali bagaimana inovasi pelayanan publik berperan dalam mencapai good governance dan perubahan fundamental dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah pengetahuan ini dengan menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana inovasi pelayanan publik dapat memengaruhi budaya organisasi, meningkatkan kinerja sektor publik, dan mendukung perubahan birokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan



pandangan yang berharga bagi praktisi pemerintah, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Temuan (Hamdillah, 2023)

Transformasi birokrasi melalui e- government harus dilakukan dengan dukungan dari beberapa faktor yaitu a) dukungan regulasi, b) struktur organisasi, c) budaya organisasi, d) pembaharuan sistem. Selain itu jika e-government yang dilaksanakan secara serius dan konsisten akan sangat menunjang transparansi pelayanan publik.(Arifah , 2020)

Transformasi birokrasi perlu dilakukan sebab birokrasi yang cerdas dan ringan adalah birokrasi yang mampu bertindak cepat atas permintaan kebutuhan masyarakat. Melihat (Hawari & Kartini, 2023). Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus). Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa kelahiran Ilmu Administrasi Negara sangat dipengaruhi oleh dua cabang ilmu, yaitu Ilmu Politik dan Ilmu Manajemen. Kesadaran bahwa Ilmu Administrasi Negara tidak dapat terlepas dari Ilmu Politik, karena proses administrasi pemerintahan tidak terlepas dari proses politik, dan realitas bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak dapat diterapkan secara general pada organisasi pemerintah dan swasta sekaligus semakin mengukuhkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Negara adalah ilmu tentang bagaimana proses administrasi pemerintahan dikelola secara baik dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan pembentukan organisasi pemerintah, yaitu untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik.

Dengan pencapaian tersebut, Dwiyanto (2007:109) menyebut bahwa Ilmu Administrasi Negara tumbuh menjadi sebuah ilmu yang semakin dewasa dan mampu menyejajarkan dirinya dengan induknya, ilmu yaitu Ilmu politik dan ilmu manajemen. Teori dalam administrasi negara dapat dilacak dari perkembangan paradigma ilmu administrasi negara itu sendiri. Pada awalnya, paradigma adalah konsep yang digunakan oleh kalangan ilmuwan natural science untuk menjelaskan fenomena perkembangan ilmu. Namun kemudian, paradigma juga dipakai oleh scientist ilmu-ilmu sosial untuk memetakan perkembangan ilmu sosial. Pada prinsipnya paradigma adalah cara pandang sekelompok orang atau pakar dalam melihat dan menganalisis fenomena sosial yang berkembang di Tengah masyarakat. Paradigma administrasi Negara sudah jauh bergeser dan meninggalkan pendulum dikotomi politik-administrasi. Dalam konteks kekinian, paradigma dikotomi politik- administrasi yang terkenal dengan adagium *when political end, administrative begin* kurang relevan dengan perkembangan teori dan praktik administrasi negara. (Immanuel Jaya, 2021)

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan proses transformasi birokrasi pemerintah dari paradigma klasik menuju paradigma modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika perubahan birokrasi secara mendalam melalui analisis terhadap teori, kebijakan, dan praktik birokrasi di Indonesia maupun secara global. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan perubahan paradigma birokrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa artikel jurnal ilmiah, buku-buku teori administrasi publik, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen kebijakan pemerintah. Sedangkan data sekunder berupa berita, laporan organisasi, dokumen arsip digital, dan publikasi lembaga resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan



melalui perpustakaan digital, database jurnal akademik, dan situs resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengklasifikasikan elemen-elemen penting dalam literatur yang berkaitan dengan ciri-ciri birokrasi klasik dan modern. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara dua paradigma tersebut untuk mengungkap bentuk dan arah transformasi yang terjadi.

## **Pembahasan**

### **Paradigma New Public Service (Nps)**

Dalam pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal. Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut. Urusan kayuh- mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah. Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misalnya persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Imanuel Jaya, 2021) Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke model manajemen publik baru (new public management), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service) menurut Denhardt dan Denhardt. (Widnyani, 2017)

### **New Public Administration (NPA)**

George Frederickson menjelaskan bahwa munculnya new public administration diawali dengan beberapa kejadian seperti pada tahun 1960-an terjadi beberapa krisis secara bersamaan. Pertama, krisis kekotaan bersumber dari suburbanisasi yang tidak bisa ditawar—yang didukung pemerintahan. Kedua, krisis rasial amat erat berhubungan dengan krisis sebelumnya, untuk sebagian berasal dari getoisasi (perkampungan di kota yang umumnya dihuni oleh penduduk dari kelompok minoritas). Dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pulalah lembaga pelayanan masyarakat, tingkat pengangguran yang tak terkendali terutama di kalangan minoritas dan sistem kesejahteraan terlalu menanggung beban yang berat. Ketiga, terjadi krisis energi diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi dan seterusnya dan semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara (A. Anggrianilamsyah, 2016)

### **New Public Manajemen (NPM)**

Intisari New Public Management berbunyi: "Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi warga. Ini artinya, warga tidak lagi dilihat sebagai abdi, melainkan sebagai pelanggan yang karena pajak yang dibayarkannya mempunyai hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula. Jadi, negara dilihat sebagai suatu perusahaan jasa modern yang kadang-kadang bersaing dengan pihak swasta, tapi di lain pihak, dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun dengan kewajiban memberikan layanan dan kualitas maksimal sejalan dengan benchmarking dan administrasi-asministrasi publik lainnya. Sayangnya administrasi klasik lebih menganggap dirinya sebagai pembuat aturan yang bertugas mendisiplinkan warga dan layanan yang mereka tawarkan sangat sedikit – dan terutama sekali – mereka tidak diwajibkan untuk menciptakan mutu layanan yang baik. Selain itu, administrasi klasik tidak bersifat terbuka: ia menganggap warga yang ingin mewujudkan haknya sebagai faktor pengganggu. Di sini pendekatan New Public Management menciptakan kriteria yang sama sekali berbeda. Prinsip dalam New Public Management berbunyi: dekat dengan warga atau pelanggan, memiliki mentalitas melayani dan luwes, inovatif dalam memberikan layanan jasa kepada warga. Menurut Huges bahwa, penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastic dari system manajemen tradisional yang kaku,



birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Perubahan adalah pemborosan.”Kalimat ini mengungkapkan bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir, dan ia hanya punya satu tugas, yakni memberikan layanan kepada rakyat yang memang berhak mendapatkannya. (Widnyani, 2017) Pola hubungan yang baru antara warga dengan birokrasi tersebut menurut Haque (1999, 312-319) membawa implikasi terhadap 5 (lima) hal yakni (1) redefinisi kewargaan/masyarakat dalam pelayanan publik; (2) transformasi etika administrasi yang mempengaruhi masyarakat; (3) transisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat; (4) perubahan peran dan kapasitas pelayanan publik dalam melayani masyarakat; serta (5) restrukturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik. (Prasojo, Maksun dan Kurniawan, 2004, 153). (Kurniawan, 2007) Dalam hal ini, pemikiran GWF Hegel, Karl Marx, dan Max Weber sebagai pemikiran klasik mengenai birokrasi akan dibahas di sini. Di tengah kajian birokrasi yang semakin berkembang menyesuaikan dengan tren perubahan yang ada, pemikiran klasik tentang birokrasi bukanlah hal yang sama sekali tidak relevan karena pengamatan yang jeli akan menemukan betapa banyak mutiara kognitif yang terpendam di dalamnya. (Antonius et al., n.d.) Revolusi pada dunia digital melahirkan luapan informasi yang deras. Sehingga kini kondisi terbalik, masyarakat modern ditonton oleh jutaan informasi. Dalam hal ini, masalahnya adalah bukan pada bagaimana masyarakat memperoleh berita, karena sekarang semua informasi mudah diakses. Permasalahannya kini terletak pada kurangnya kemampuan dalam mencerna informasi yang benar. Limbah-limbah informasi justru banyak tercerap oleh masyarakat yang tidak memiliki daya literasi yang kuat. (Faedlulloh & Duadji, 2019)

## **Kesimpulan**

Konsep inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan suatu hal yang memperkenalkan ide- baru, barang baru, sistem baru, pendekatan baru atau bahkan cara-cara pelayanan yang terbaru sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi pemakainya. (Rahmaini, 2021). Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era modern, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran penting dalam mendorong efisiensi dan transformasi birokrasi. (Ummah, 2019). Kinerja e -government Indonesia masih harus ditingkatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah. Dengan disahkannya Undang- undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) maka diharapkan e-government akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Transformasi birokrasi melalui e-government harus dilakukan dengan dukungan dari beberapa faktor yaitu a) dukungan regulasi, b) struktur organisasi, c) budaya organisasi, (Arifah , 2020)

Transformasi birokrasi pemerintah sangat penting untuk terus diarahkan kedalam suatu perubahan menuju desain baru yang lebih kondusif dalam pengembangan inovasi, manajemen inovasi, serta pengelolaan risiko untuk pembangunan kolaborasi dan sinergitas. Pengarahan. (Hawari & Kartini, 2023). Birokrasi yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa anggaran pada akhir tahun buku. (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Dalam kesimpulan, konsep struktur kekuasaan dalam teori Weber adalah konsep penting dalam memahami organisasi modern dan tata kekuasaan. Tiga bentuk otoritas yang diidentifikasi oleh Weber - otoritas tradisional, rasional-legal, dan karismatik - membantu kita memahami bagaimana kekuasaan didefinisikan, didistribusikan, dan digunakan dalam berbagai konteks. Pemahaman yang baik tentang pengaruh dan implikasi dari ketiga bentuk otoritas ini membantu kita mengelola organisasi dan struktur



kekuasaan dengan lebih efektif, serta menjelaskan berbagai fenomena dalam masyarakat dan politik. Organisasi. (Devi et al., 2023)

#### **Daftar Pustaka**

- AAnggrianiIamsyah(2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Antonius, O., Prasetyo, G., & Han, D. (n.d.). Pengantar Birokrasi Klasik :Arifah , U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(2), 30–41. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245>
- Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Indri Yani Harahap, N. (2023). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268–281.
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>
- Hamdillah, H. (2023). Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi: Pendekatan Administrasi Publik dalam Meningkatkan Good Governance. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 91–102. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.5672>
- Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275>
- Immanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371>
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23